



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

**SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TAHUN 2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perwujudan Sistem Transportasi Nasional yang efektif dan efisien perlu dibuat dokumen Sistem Transportasi Nasional pada tataran transportasi Nasional, tataran transportasi wilayah dan tataran transportasi Kabupaten/Kota, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan transportasi yang terpadu.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2030;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pusat, Rencana Tata Ruang Wilayah Khusus;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis, Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Transportasi Jalan;
24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor.KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030;
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tatanan Kebandar Udara Nasional;

29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Multimoda;
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. KM 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda;
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TAHUN 2030.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2030.
- (2) Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan dalam penyelenggaraan transportasi di Provinsi Lampung bagi para pemangku kepentingan terkait.
- (3) Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) bagian meliputi:
 - a. Pendahuluan
 - b. Pendekatan
 - c. Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program
 - d. Penutup
- (4) Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, berfungsi sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja penyelenggaraan transportasi di wilayah Provinsi, kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Pasal 3

Koordinasi pelaksanaan Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Lampung dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	Dinas Perhubungan

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 10 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 10 - 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. BERLIAN TH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR : 38

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 38 - TAHUN 2013
TANGGAL : 10 - Oktober - 2013

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN
	A. LATAR BELAKANG
	B. TUJUAN
	C. PENGERTIAN
	D. SISTEMATIKA
BAB II.	PENDEKATAN
	A. SISTRANAS
	B. SISTRANAS PADA TATRANAS
	C. SISTRANAS PADA TATRAWIL
BAB III.	VISI, MISI, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM
	A. VISI
	B. MISI
	C. KEBIJAKAN
	D. STRATEGI
	E. PROGRAM
BAB IV.	PENUTUP
Lampiran I	Peta Pulau Sumatera
Lampiran II	Peta Jaringan Pelayanan Transportasi Di Provinsi Lampung (Jaringan Antar Provinsi dan Dalam Provinsi) (Tahun 2014, Tahun 2019, Tahun 2025 dan Tahun 2030)
Lampiran III	Peta Jaringan Prasarana Transportasi Di Provinsi Lampung (Jaringan Skala Nasional dan Skala Provinsi) (Tahun 2014, Tahun 2019, Tahun 2025 dan Tahun 2030)
Lampiran IV	Tabel Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi Nasional Di Provinsi Lampung (Tahun 2014, Tahun 2019, Tahun 2025 dan Tahun 2030)
Lampiran V	Tabel Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Nasional Di Provinsi Lampung (Tahun 2014, Tahun 2019, Tahun 2025 dan Tahun 2030)
Lampiran VI	Tabel Jaringan Pelayanan Transportasi Wilayah Di Provinsi Lampung (Tahun 2014, Tahun 2019, Tahun 2025 dan Tahun 2030)
Lampiran VII	Tabel Jaringan Prasarana Transportasi Wilayah Di Provinsi Lampung (Tahun 2014, Tahun 2019, Tahun 2025 dan Tahun 2030)

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perwujudan sistem transportasi yang efektif dan efisien menghadapi berbagai tantangan, peluang dan kendala sehubungan dengan adanya perubahan lingkungan yang dinamis seperti otonomi daerah, globalisasi ekonomi, perubahan perilaku permintaan jasa transportasi, kondisi politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepedulian pada kelestarian lingkungan hidup serta adanya keterbatasan sumber daya. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, sistem transportasi nasional perlu terus ditata dan disempurnakan dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga terwujud keterpaduan antar dan intra moda transportasi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan, tuntutan masyarakat serta perdagangan nasional dan internasional dengan memperhatikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi.

Berdasarkan kondisi seperti yang disebutkan di atas dan dengan memperhatikan perkiraan perubahan pola aktivitas, pola pergerakan, serta peruntukan lahan, maka perlu disusun dokumen Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah berupa jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi wilayah jangka menengah dan panjang sebagai salah satu perwujudan Sistranas dan menjadi pedoman atau acuan pembangunan transportasi di wilayah.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan dokumen Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah adalah sebagai acuan penyelenggaraan transportasi di wilayah Provinsi.

C. PENGERTIAN

1. **Jaringan lalu lintas dan transportasi jalan adalah** serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan transportasi jalan.
2. **Simpul adalah** tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan/atau bandar udara.
3. **Prasarana lalu lintas dan transportasi jalan** adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.

4. **Transportasi antarmoda** adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.
5. **Transportasi multimoda** adalah transportasi barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda transportasi yang berbeda, atas dasar satu kontrak yang menggunakan Dokumen Transportasi Multimoda dari suatu tempat barang diterima oleh operator transportasi multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penerimaan barang tersebut.
6. **Transportasi jalan** yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah lalu lintas transportasi jalan dan jaringan jalan.
7. **Transportasi sungai dan danau** yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah pelayaran di sungai dan danau.
8. **Transportasi kereta api** yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah perkeretaapian.
9. **Transportasi penyeberangan** yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah pelayaran yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau kereta api yang terputus.
10. **Transportasi laut** yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah pelayaran di laut.
11. **Transportasi udara** yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah penerbangan.
12. **Prasarana perkeretaapian** adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
13. **Jalur kereta api** adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
14. **Jaringan jalur kereta api** adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
15. **Pelayaran** adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas transportasi di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
16. **Trayek** adalah rute atau lintasan pelayanan transportasi dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
17. **Kepelabuhanan** adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
18. **Pelabuhan Utama** adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan transportasi laut dalam negeri dan internasional, alih muat transportasi laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta transportasi penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarProvinsi.
19. **Pelabuhan Pengumpul** adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan transportasi laut dalam negeri, alih muat transportasi laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang

dan/atau barang, serta transportasi penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.

20. **Pelabuhan Pengumpan** adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan transportasi laut dalam negeri, alih muat transportasi laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta transportasi penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.
21. **Penerbangan** adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, transportasi udara, navigasi penerbangan keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
22. **Rute penerbangan** adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
23. **Kebandarudaraan** adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
24. **Bandar Udara** adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
25. **Bandar Udara Umum** adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
26. **Bandar Udara Khusus** adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
27. **Bandar Udara Domestik** adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.
28. **Bandar Udara Internasional** adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.
29. **Bandar Udara Pengumpul (*hub*)** adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai Provinsi.
30. **Bandar Udara Pengumpan (*spoke*)** adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
31. **Wilayah** adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
32. **Wilayah nasional** adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
33. **Pusat Kegiatan Nasional (PKN)** adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu atau semua kriteria sebagai berikut:

- berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa Provinsi;
- berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa Provinsi.

34. **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)** adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu atau semua kriteria sebagai berikut:

- berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa-jasa yang melayani beberapa kabupaten;
- berpotensi atau berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
- berpotensi atau berfungsi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor mendukung PKN.

D. SISTEMATIKA

Dokumen Sistranas Pada Tatrabil ini terdiri dari Pendahuluan, pendekatan tataran transportasi, visi, misi, kebijakan dan strategi serta program pengembangan transportasi wilayah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan program pengembangan transportasi wilayah meliputi program optimalisasi dan pembangunan, sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan Dokumen Sistranas Pada Tatrabil, tujuan, pengertian serta sistematika penulisan.
- Bab II. Pendekatan berisi gambaran sistranas, sistranas pada tatrabil Dan Sistranas Pada Tatrabil.
- Bab III. Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program Pengembangan Transportasi wilayah.
- Bab IV. Penutup.

BAB II

PENDEKATAN

A. SISTRANAS

1. DEFINISI

Sistranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan antar moda terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara serta transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

2. TATARAN TRANSPORTASI

Sistranas diwujudkan dalam tiga tataran, yaitu Sistranas pada Tataran Transportasi Nasional (Sistranas pada Tatranas), Sistranas pada Tataran Transportasi Wilayah (Sistranas pada Tatrakil) dan Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Sistranas pada Tatrakalok).

3. ARAH PERWUJUDAN

Pengembangan transportasi nasional diorientasikan pada upaya penyeimbangan antara permintaan jasa transportasi dengan penyediaan jaringan prasarana dan pelayanan transportasi. Pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan dilakukan pada masing-masing tataran dengan memperhatikan aspek komersial dan aspek keberintisan, aspek keselamatan, keunggulan masing-masing moda transportasi sesuai dengan kondisi geografi, kependudukan, dan sumber daya alam, yang diarahkan untuk mengintegrasikan dan mengkombinasikan moda yang ada, baik transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut, dan udara, maupun pipa, sesuai dengan potensi wilayah.

Perwujudan Sistranas berupa Tataran Transportasi Nasional (TATRANAS), Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) dan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK). Tataran transportasi tersebut memuat tatanan mengenai pelayanan, jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi. Keterkaitan ke tiga tataran tersebut secara terintegrasi menjadi acuan bagi semua pihak terkait dalam penyelenggaraan dan pembangunan transportasi untuk perwujudan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien baik pada tataran wilayah maupun lokal.

Di dalam undang-undang bidang transportasi diamanahkan penetapan rencana induk dan tatanan mengenai simpul transportasi. Dokumen-dokumen tersebut antara lain meliputi:

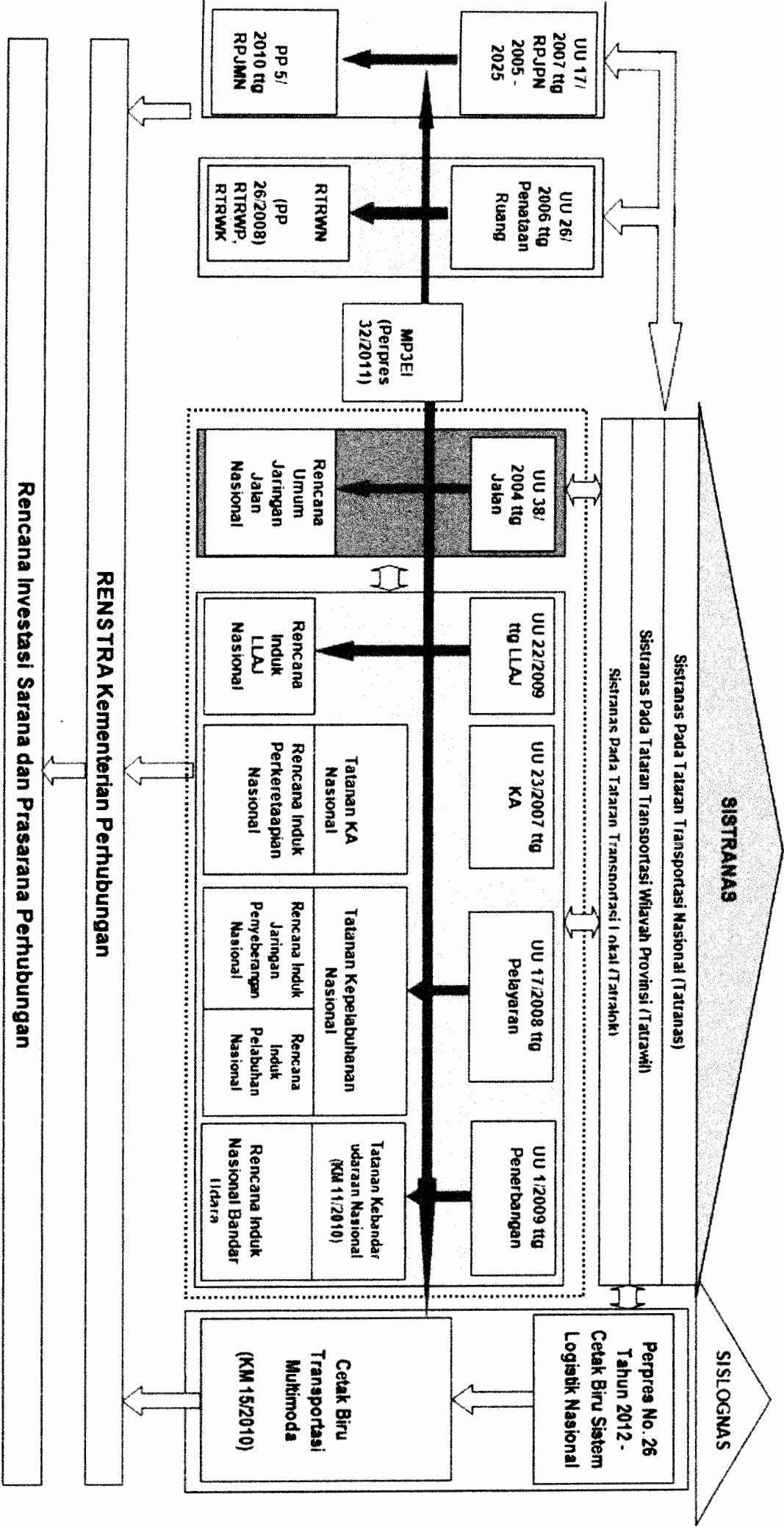
- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Multimoda
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan

- c. Cetak Biru Transportasi Sungai dan Danau (sedang dalam proses penyelesaian)
- d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
- f. Tatanan Kepelabuhanan (sedang dalam proses penyelesaian)
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tatanan Kebandar Udara Nasional

Penyelarasan dokumen Sistranas sejalan dengan perkembangan dan dinamika nasional dan lingkungan strategis serta harmonisasi dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta empat peraturan perundang-undangan transportasi, Sistem Logistik Nasional, Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda mempunyai korelasi yang kuat dengan ekonomi.

Kedudukan Sistranas, Sistranas pada Tatranas, Sistranas pada Tatrabil serta dokumen terkait di masing-masing moda transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Integrasi Perwujudan Sistranas



A. SISTRANAS PADA TATRANAS

1. DEFINISI

Sistranas pada Tattranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan antar moda, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota nasional dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya.

2. FUNGSI SISTRANAS PADA TATRANAS

Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Nasional (Sistranas pada Tattranas) berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang dan/atau barang antar simpul atau kota nasional dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya.

3. ARAH PENGEMBANGAN

Arah pengembangan transportasi didekati dari tiga sisi, yaitu geografi, demografi, dan sumber daya alam. Dari sisi geografi, Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, pengembangan transportasi diarahkan untuk penyediaan pelayanan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dalam bentuk transportasi antar moda dalam pulau dan antar pulau. Dari sisi demografi, pengembangan transportasi antar moda diarahkan untuk penyediaan pelayanan yang disesuaikan dengan kepadatan populasi yang terbagi dalam dua kategori yaitu untuk kawasan perkotaan (*urban transport*) dan perdesaan (*rural transport*). Dari sisi sumber daya alam, pengembangan transportasi harus mempertimbangkan moda transportasi yang lebih efektif dan efisien seperti transportasi pipa untuk mengangkut LNG, transportasi kereta api mengangkut hasil perkebunan dan hasil pertambangan.

B. SISTRANAS PADA TATRAWIL

1. DEFINISI

Sistranas pada Tatrawil adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan antar moda terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota wilayah, dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya.

2. FUNGSI SISTRANAS PADA TATRAWIL

Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah (Sistranas pada Tatrawil) berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang dan

atau barang antar simpul atau kota wilayah dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya.

3. ARAH PENGEMBANGAN

Arah pengembangan jaringan transportasi di Provinsi Lampung adalah untuk mewujudkan jaringan transportasi wilayah yang bertumbuh, merata dan terpadu, sehingga pelayanan jasa transportasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

BAB III

VISI, MISI, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

A. VISI

"Terwujudnya sistem transportasi di wilayah Provinsi Lampung tahun 2030 yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah"

Sistem transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok Provinsi Lampung serta mampu mendukung pembangunan nasional.

Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.

Memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan produksi Provinsi Lampung melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok Provinsi Lampung, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

B. MISI

Untuk mencapai visi tersebut di atas maka dirumuskan misi dengan mengacu kepada tiga pendekatan sebagai berikut:

1. **Pemulihan** kondisi jaringan pelayanan dan prasarana transportasi agar berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya;
2. **Peningkatan dan pembangunan** jaringan pelayanan dan prasarana transportasi dalam rangka **peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan kualitas pelayanan** jasa transportasi;
3. **Pelaksanaan dan pengembangan** riset teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Oleh karena itu misi yang diemban dalam Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Lampung ini adalah:

1. Memulihkan kinerja pelayanan jasa transportasi:

Kinerja pelayanan jasa transportasi semakin memburuk karena operator tidak mampu melakukan perawatan dan peremajaan armada, pemerintah hampir tidak memiliki kemampuan melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan masyarakat pengguna jasa tidak memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Provinsi Lampung, perlu diupayakan pemulihan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi normal, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi.

2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi:

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat di Provinsi Lampung terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan perdesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal dan pulau-pulau kecil yang masih menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Lampung.

3. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai:

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi di Provinsi Lampung dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang akan dituangkan dalam rencana induk transportasi Provinsi Lampung dan pedoman teknis yang telah ditetapkan.

C. Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi 2030

Arah kebijakan pembangunan sektor transportasi Provinsi Lampung adalah meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan jasa transportasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Secara umum upaya tersebut antara lain meliputi:

- a. meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi baik di kawasan perkotaan maupun daerah terpencil, terisolir dan belum berkembang;
- b. penyediaan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas;
- c. meningkatkan keselamatan operasional baik sarana maupun prasarana transportasi.

Arah kebijakan masing-masing sub sektor adalah sebagai berikut:

a. Transportasi Multimoda

Arah kebijakan transportasi multimoda meliputi:

1. optimalisasi ruang kegiatan yang ada dengan penyediaan simpul dan lintas transportasi yang menghubungkan berbagai jenis moda, serta menyediakan fasilitas bongkar muat dan transit yang efektif dan efisien.
2. melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan pelayanan transportasi multimoda agar dapat melayani transportasi penumpang dan barang yang lengkap dengan jasa tambahan, mulai dari jasa pengurusan transportasi, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, pengurusan kepabeanan untuk transportasi multimoda ke luar atau ke dalam negeri.

b. Transportasi Jalan

Arah kebijakan transportasi jalan meliputi:

1. mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah Provinsi Lampung yang merupakan acuan

- pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya;
2. mempertahankan kinerja pelayanan jaringan jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan;
 3. Peningkatan kondisi jaringan pelayanan dan menjamin efisiensi pelayanan transportasi transportasi umum jalan raya;
 4. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana dan sarana transportasi jalan;
 5. peningkatan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari aspek pencegahan, pembinaan, penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan; dan kelaikan sarana dan prasarana;
 6. meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi;
 7. menjaga ketersediaan aksesibilitas transportasi pada daerah terpencil;
 8. penataan sistem transportasi jalan sejalan dengan sistem transportasi wilayah Provinsi dan lokal kabupaten/kota untuk menunjang sistem transportasi nasional;
 9. peningkatan pembinaan teknis penataan transportasi kota di daerah kabupaten/kota;
 10. sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, dibuat sistem standar pelayanan minimal dan standar teknis di bidang LLAJ serta skema untuk peningkatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan LLAJ di daerah;
 11. mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan;
 12. meningkatkan kelancaran pelayanan transportasi jalan secara terpadu: penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, fasilitas dan rambu jalan;
 13. mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui penataan jaringan;
 14. penerapan teknologi transportasi jalan yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.

c. Transportasi Sungai dan Danau (ASD)

Arah kebijakan transportasi sungai dan danau meliputi:

1. memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana serta pengelolaan transportasi sungai dan danau;
2. meningkatkan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh serta memperluas jaringan pelayanan sungai dan danau;
3. mengembangkan transportasi sungai terutama di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji, yang memiliki sungai cukup besar;
4. mengembangkan transportasi danau untuk menunjang program wisata;
5. memperbaiki tatanan pelayanan transportasi antar moda dan kesinambungan transportasi darat yang terputus (sungai dan danau) di dalam Provinsi Lampung, sejalan dengan sistem transportasi di wilayah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota;
6. mendorong peran serta pemda dan swasta dalam penyelenggaraan transportasi sungai dan danau;
7. peningkatan pelayanan transportasi sungai dan danau sebagai pendukung moda transportasi lainnya.

d. Transportasi Penyeberangan

Arah kebijakan transportasi penyeberangan meliputi:

1. meningkatkan peran transportasi penyeberangan sebagai salah satu transportasi yang memiliki peranan penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi terutama komoditi unggulan di Provinsi Lampung
2. mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas transportasi penyeberangan yang sudah ada dan sudah jenuh untuk memperluas pelayanan jaringan dan ikut peran serta dalam pertumbuhan ekonomi.
3. membangun dermaga dan fasilitas lainnya di daerah yang membutuhkan untuk meningkatkan peran serta transportasi penyeberangan dalam perekonomian dan sebagai alternatif transportasi.
4. memperbaiki keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana serta pengelolaan transportasi penyeberangan;
5. mendorong peran serta pemda dan swasta dalam penyelenggaraan transportasi penyeberangan;
6. peningkatan pelayanan transportasi penyeberangan sebagai pendukung moda transportasi lainnya.

e. Transportasi Perkeretaapian

Arah kebijakan transportasi perkeretaapian meliputi:

1. peningkatan kapasitas lintas dan kualitas pelayanan serta optimalisasi koridor-koridor yang ada;
2. peningkatan keselamatan transportasi melalui pemulihan kondisi pelayanan prasarana dan sarana transportasi perkeretaapian serta pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian;
3. peningkatan peran transportasi perkeretaapian melalui perwujudan keterpaduan intra dan antar moda dan pengembangan kereta api perkotaan;
4. peningkatan peran serta pemerintah daerah dan swasta di bidang perkeretaapian;
5. peningkatan SDM perkeretaapian dan pengembangan teknologi perkeretaapian nasional di Provinsi Lampung;
6. meningkatkan strategi pelayanan transportasi yang lebih berdaya saing secara antar moda dan inter moda;
7. meningkatkan peran transportasi perkeretaapian di tingkat wilayah dan di Provinsi Lampung.

f. Transportasi Laut

Arah kebijakan transportasi laut meliputi:

1. meningkatkan peran transportasi laut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung;
2. meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi laut;
3. membangun, mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas pelabuhan yang memiliki potensi;
4. meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi laut dan kepelabuhan.

g. Transportasi Udara

Arah kebijakan transportasi udara meliputi:

1. memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang dikeluarkan oleh ICAO (*International Civil Aviation Organization*) guna meningkatkan keselamatan penerbangan, baik selama penerbangan maupun di bandara wilayah Provinsi Lampung;
2. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi udara di daerah rawan bencana alam dan di daerah yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata;

3. peningkatan sarana dan prasarana transportasi udara sesuai standar internasional yang ditetapkan oleh ICAO;
3. menciptakan iklim usaha jasa transportasi udara yang kondusif sehingga mempunyai kelangsungan hidup jangka panjang.

D. Strategi Pengembangan Sistem Transportasi 2030

a. Transportasi Multimoda

Strategi pengembangan transportasi multimoda meliputi:

1. membentuk penyelenggara transportasi multimoda yang dapat memberikan layanan transportasi barang dari tempat asal ke tempat tujuan.
2. meningkatkan kinerja layanan transportasi barang "satu pintu" sehingga dapat melayani transportasi barang multimoda baik untuk ke luar negeri maupun di dalam negeri
3. menyediakan armada/trayek menerus untuk perjalanan asal moda transportasi udara, darat dan laut
4. menyediakan armada/trayek berjadwal yang sesuai untuk melayani rute jalan yang terputus (sungai dan danau) di dalam Provinsi Lampung, sejalan dengan sistem transportasi di wilayah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota.

b. Transportasi Jalan

Strategi pengembangan transportasi jalan meliputi:

1. membuka akses daerah terisolir dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah di Provinsi Lampung;
2. meningkatkan aksesibilitas dari kawasan-kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya ke tujuan-tujuan pemasaran, baik ke kawasan ekonomi di Provinsi Lampung dan nasional maupun ke kawasan internasional;
3. mendukung peningkatan pemanfaatan potensi unggulan wilayah secara optimal, yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan di Provinsi Lampung;
4. mendukung misi pengembangan sistem kota-kota yang terpadu melalui pengintegrasian pusat-pusat kota baik industri, pertambangan, maupun pariwisata serta kota-kota agropolitan, baik kehutanan, pertanian maupun perkebunan dengan jaringan jalan di Provinsi Lampung;
5. mendorong berfungsinya jaringan jalan lintas di Provinsi Lampung secara bertahap dengan urutan prioritas serta jalan-jalan pengumpan yang menghubungkan jalan-jalan lintas di Provinsi Lampung;
6. mewujudkan keterpaduan sistem transportasi wilayah di Provinsi Lampung untuk mendukung keterpaduan sistem transportasi di wilayah Sumatera, Nasional, dan sub regional ASEAN;
7. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan sistem jaringan transportasi lainnya;
8. mengembangkan terminal penumpang tipe A sebagai simpul jaringan transportasi jalan di kota Bandar Lampung yang berfungsi sebagai PKN dan memiliki permintaan tinggi untuk pergerakan penumpang antar-kota antar-Provinsi.

c. Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Strategi pengembangan transportasi *sungai, danau, dan penyeberangan* meliputi:

1. memanfaatkan danau, sungai, dan alur penyeberangan yang berpotensi untuk mendukung pengembangan sistem transportasi di Provinsi Lampung, ekonomi dan pariwisata;
2. meningkatkan pelayanan simpul-simpul dalam sistem jaringan penyeberangan antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung dan antar Provinsi;

3. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dengan sistem jaringan transportasi lainnya;
4. Pengembangan transportasi sungai pada lintas-lintas yang sulit dikembangkan dengan jaringan jalan;
5. pengembangan jaringan transportasi sungai untuk pelayanan transportasi lintas antar kabupaten/kota yang diarahkan pada daerah-daerah potensial di Provinsi Lampung dan yang diarahkan menjadi tulang punggung sistem transportasi serta diharapkan dapat membuka daerah yang terisolir.

d. Penyeberangan

Strategi pengembangan transportasi Penyeberangan meliputi:

1. membangun Dermaga dan fasilitas penunjang di Kab. Tulang Bawang;
2. membangun Dermaga dan fasilitas pendukung di Danau Ranau;
3. membangun Dermaga dan fasilitas penunjang Pelabuhan Bakauheni;
4. mengembangkan dan membangun pelabuhan Ketapang dan fasilitas penunjang;
5. mengembangkan transportasi penyeberangan lokal;
6. mengembangkan Dermaga dan fasilitas Pelabuhan
7. memanfaatkan alur penyeberangan yang berpotensi untuk mendukung pengembangan sistem transportasi di Provinsi Lampung, ekonomi dan pariwisata;
8. meningkatkan pelayanan simpul-simpul dalam sistem jaringan penyeberangan antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung dan antar Provinsi
9. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan transportasi penyeberangan dengan sistem jaringan transportasi lainnya.

e. Transportasi Kereta Api

Strategi pengembangan transportasi kereta api meliputi:

1. mengembangkan jaringan transportasi kapasitas tinggi untuk transportasi penumpang dan barang, khususnya untuk produk komoditas berskala besar, berkecepatan tinggi, berbiaya murah, dengan energi yang rendah;
2. mendukung pengembangan sistem kota-kota di Provinsi Lampung yang terpadu melalui pengintegrasian kota-kota, baik industri, pertambangan, maupun pariwisata serta kota-kota agropolitan, baik kehutanan, pertanian maupun perkebunan;
3. mewujudkan keterpaduan sistem transportasi di Provinsi Lampung dalam rangka keterpaduan sistem transportasi di wilayah Pulau Sumatera, Nasional, dan sub regional ASEAN;
4. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan kereta api dengan sistem jaringan transportasi lainnya.
5. mengembangkan stasiun kereta api sebagai simpul jaringan jalur kereta api yang diarahkan pada kota Bandar Lampung sebagai PKN dan kota-kota PKW;
6. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana KA di Provinsi Lampung;
7. pengembangan jaringan kereta api antar kota lintas utama dengan prioritas tinggi
8. pengembangan jaringan kereta api perkotaan
9. pengembangan jaringan kereta api yang menghubungkan wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan
10. pengembangan jaringan kereta api yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera (Interkoneksi) dengan pembangunan Jembatan Selat Sunda.

f. Transportasi Laut

Strategi pengembangan transportasi laut meliputi:

1. meningkatkan aksesibilitas dari kawasan-kawasan andalan dan kawasan budidaya di Provinsi Lampung ke tujuan-tujuan pemasaran, baik ke kawasan nasional, sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, maupun kawasan internasional lainnya;
2. mengembangkan jaringan transportasi laut antar-negara melalui pelabuhan yang menangani petikemas di Pelabuhan Panjang - Bandar Lampung;
3. mengembangkan keterkaitan yang erat dan saling mendukung antara kegiatan kepelabuhanan dengan kegiatan industri manufaktur, petrokimia, dan/atau industri pengolahan bahan baku;
4. mengembangkan sistem jaringan transportasi laut di Provinsi Lampung untuk kebutuhan ekspor – impor perekonomian dan kepentingan lainnya;
5. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan transportasi laut dengan sistem jaringan transportasi lainnya;
6. mengembangkan transportasi laut perintis untuk membuka daerah terisolir dan daerah non komersil;
7. membangun dan meningkatkan terminal penumpang, terutama bagi daerah tujuan wisata;
8. merencanakan kebutuhan pengembangan kapasitas pelabuhan, fasilitas, perangkat lunak;
9. meningkatkan manajemen lalu-lintas kapal di pelabuhan.

g. Transportasi Udara

Strategi pengembangan transportasi udara meliputi:

1. memantapkan fungsi bandar udara pusat penyebaran di Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar kota dalam lingkup Pulau Sumatera maupun antar kota dalam lingkup nasional;
2. membuka dan memantapkan jalur-jalur penerbangan internasional antara kota Bandar Lampung sebagai PKN dengan negara tetangga dan negara-negara pusat pemasaran produksi dan jasa, khususnya ke kawasan sub-regional ASEAN, sesuai dengan kebutuhan layanan penerbangan komersial;
3. mengembangkan sistem jaringan transportasi udara di Provinsi Lampung secara sebagai satu kesatuan sistem transportasi wilayah di Pulau Sumatera, Nasional dan Internasional;
4. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan transportasi udara dengan sistem jaringan transportasi lainnya;
5. mengembangkan sistem jaringan transportasi udara di Provinsi Lampung secara dinamis dengan memperhatikan tatanan kebandarudaraan nasional.
6. peningkatan kelaikan armada dan instrumen keselamatan penerbangan di bandara.

E. Program Pengembangan Sistem Transportasi 2030

Program pembangunan transportasi Provinsi Lampung merupakan program skala nasional dan wilayah Provinsi di Lampung yang mengacu pada sistranas dan sistranas pada Tataran Transportasi Nasional khususnya di Pulau Sumatera sebagaimana pada lampiran I. Program pembangunan jaringan pelayanan transportasi baik skala nasional maupun skala wilayah sebagaimana pada peta lampiran II dan secara spesifik dituangkan pada tabel lampiran IV untuk jaringan pelayanan transportasi nasional dan tabel lampiran VI untuk jaringan prasarana transportasi wilayah, sedangkan program pembangunan jaringan prasarana transportasi baik skala nasional maupun skala wilayah sebagaimana pada peta lampiran III dan secara spesifik dituangkan pada tabel lampiran V untuk jaringan prasarana transportasi nasional dan tabel lampiran

VII untuk jaringan prasarana transportasi wilayah yang terbagi dalam beberapa tahapan (milestone), yaitu: pada kondisi eksisting, jangka pendek (2014 – 2019), jangka menengah (2020 – 2025), dan jangka panjang (2026 – 2030).

Program-program pengembangan tersebut meliputi beberapa bidang/sector transportasi antara lain: transportasi jalan raya, transportasi kereta api, transportasi udara, dan transportasi antarmoda.

BAB IV **PENUTUP**

Sebagai perwujudan dari Sistranas, maka pengembangan transportasi pada tataran wilayah diorientasikan kepada upaya pengembangan keseimbangan antara penyediaan jaringan prasarana dan pelayanan dengan permintaan jasa transportasi (*supply dan demand*) yang memperhatikan *potential demand* namun juga tetap memperhatikan kebutuhan jasa transportasi bagi masyarakat yang terisolir dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah.

Berhasilnya pelaksanaan Sistranas pada Tatravil secara konsekuen dan penuh tanggung jawab, sangat tergantung kepada sumber daya manusia dan partisipasi seluruh masyarakat dan berbagai sektor terkait lainnya serta seluruh aparatur transportasi baik di Provinsi, maupun kabupaten/kota.

Dokumen Sistranas pada Tataran Transportasi Wilayah ini merupakan pedoman yang digunakan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi wilayah secara terintegrasi.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	Dinas Perhubungan
9	
10	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Lampiran I Tabel Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi Nasional Di Provinsi Lampung (2014,2019,2025 Dan 2030)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030		
1	Treyek antar moda														
a.	Perluasan sosialisasi TITAM rute Bandung – Palembang melalui Pelabuhan Bakauheni	-	-											Dijien Hubdat &KA	Dishub Lampung, PT KAI
b.	Optimalisasi Pelaksanaan TITAM Bandung – Palembang melalui Pelabuhan Bakauheni	-	-											Dijien Hubdat & KA	Dishub Lampung, PT KAI
2	AKAP														
a.	Pertbaikan pelayanan dan kinerja armada													Dijien Hubdat	Dishub Lampung & PO terkait
b.	Peningkatan armada pada treyek yang memiliki LF besar terutama asal Jawa Barat													Dijien Hubdat	Dishub Lampung & PO terkait
c.	Pengembangan rute pelayanan lampung-merak terkait dengan pembangunan JSS	-	-											Dijien Hubdat	Dishub Lampung & PO terkait
d.	Pengembangan Rute Pelayanan tujuan melalui kota/kabupaten di daerah Pulau Jawa untuk mengakomodir pergerakan penumpang terkait pembangunan JSS	rule	1											Dijien Hubdat	Dishub Lampung & PO terkait
3	Lintas Penyeberangan														
a.	Optimalisasi Pelayanan Penyeberangan di Lintas Merak – Bakauheni	-	-											Dijien Hubdat	Dishub Lampung & PT ASDP
b.	Peningkatan kinerja pelayanan dengan mempercepat waktu tunggu (delay)	-	-											Dijien Hubdat	Dishub Lampung & PT ASDP
c.	Studi penerapan sistem sandar kapal berdasarkan waktu tanpup kapal dengan menyesuaikan jumlah kapal sandar dan waktu berlayar dan berlabuh serta naik-turun penumpang dan barang.	-	-											Dijien Hubdat	Dishub Lampung & PT ASDP
4	Lintas Kereta Api														
a.	Studi potensi transportasi kereta api lintas Sumatera-Jawa melalui rel kereta api yang terintegrasi dengan Jembatan Selat Sunda	-	-											Dijien Perkeretaapian	Dishub Lampung
b.	Penyiapan skema pengusahaan dan operasional untuk pengadaan lintasan baru menyatu dengan Jembatan Selat Sunda	-	-											Dijien Perkeretaapian	Dishub Lampung
c.	Penyapan armada kereta api untuk melayani transportasi kereta api lintas Sumatera-Jawa melalui rel kereta api yang terintegrasi dengan Jembatan Selat Sunda	-	-											Dijien Perkeretaapian	Dishub Lampung
5	Treyek Transportasi Laut														
a.	Studi optimalisasi pelayanan rute Merak – Pelabuhan Panjang sebagai solusi kemacetan di Pelabuhan Merak	Rule	1											Dijien Hubda	Dishub Lampung

Lampiran II Tabel Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Nasional di Provinsi Lampung (2014,2019,2025 dan 2030)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN								PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030
1	Prasarana Antarmoda (Optimalisasi dan pembangunan)												
a.	Optimalisasi Simpul yang ada agar dapat terintegrasi dengan moda pendukung yang ada di sekitarnya	-	-									Ditjen Perhubungan Darat	Dishub Lampung
b.	Melaksanakan studi kebutuhan terminal terintegrasi di bandar Udara Raden Inten dengan Moda Darat (Jalan dan KA) di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	Studi	2									Ditjen Perhubungan Darat	Dishub Lampung
c.	Membangun Infrastruktur Fasilitas Terminal dalam memperkuat jaringan pelayanan multi moda darat (jalan dan KA)	-	-									Ditjen Perhubungan Darat dan KA	Dishub Lampung
2	Jaringan Jalan dan Terminal (Optimalisasi dan pembangunan)												
a.	Pembangunan fasilitas jaringan dan keselamatan Jalan Lintas Timur: Bakauheni – Ketapang – Labuhan Maringgai – Sukadana – Menggala – Mesuji – Kayu Agung (Sumatera Selatan)	km	289,57									Kementerian PU & Ditjen Perhubungan Darat	Dishub & Dinas PU BM Lampung
b.	Pembangunan peningkatan kapasitas Jalan Lintas Timur: Bakauheni – Ketapang – Labuhan Maringgai – Sukadana – Menggala – Mesuji – Kayu Agung (Sumatera Selatan)	km	289,57									Kementerian PU & Ditjen Perhubungan Darat	Dishub & Dinas PU BM Lampung
c.	Pembangunan fasilitas jaringan dan keselamatan Jalan Lintas Tengah: Bakauheni-Kalahanda-Bandar Lampung-Bandar Jaya-Kota Bumi-Bukit Kemuning-Biambangan Umpu-Batas Sumatera Selatan	km	318,95									Kementerian PU & Ditjen Perhubungan Darat	Dishub & Dinas PU BM Lampung
d.	Pembangunan peningkatan kapasitas Jalan Lintas Tengah: Bakauheni-Kalahanda-Bandar Lampung-Bandar Jaya-Kota Bumi-Bukit Kemuning-Biambangan Umpu-Batas Sumatera Selatan	km	318,95									Kementerian PU & Ditjen Perhubungan Darat	Dishub & Dinas PU BM Lampung
e.	Pembangunan fasilitas jaringan dan keselamatan Jalan Lintas Barat: Bandar Lampung – Pringsayu - Kota Agung –	km	430,33									Kementerian PU & Ditjen Perhubungan	Dishub & Dinas PU BM Lampung

(2014,2019,2025 Dan 2030)

1. Transportasi Antar Moda

[illegible]

5. Transportasi Kereta Api

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030		
1	Penyusunan Masterplan Perkotaan Provinsi Lampung	-	-											Dishub Lampung	PT KAI Perusahaan Tambang
2	Pengembangan jaringan pelayanan Transportasi KA Bandar Lampung – Kota Bumi - Way Kanari	Lintasan	1											Dishub Lampung	PT KAI
3	Pengembangan Transportasi KA Penumpang: Bakauheni – Sukadana - Kayu Agung, untuk menunjang program Trans Sumatera/Asia Railways;	Lintasan	1											Dishub Lampung	PT KAI
4	Pengembangan Transportasi KA: Bandar Lampung – Bakauheni;	Lintasan	1											Dishub Lampung	PT KAI
5	Pengembangan Layanan Feeder KA: Bandar Lampung – Terbanggi Besar – Menggala – Mesuji;	Feeder	4											Dishub Lampung	PT KAI
6	Pengembangan Layanan Feeder KA: Tanjung Karang – Rejosari – Pesawaran – Pringsewu;	Feeder	4											Dishub Lampung	PT KAI
7	Pengembangan Layanan Feeder KA: Tanjung Karang – Tegmeneng – Metro – Sukadana;	Feeder	4											Dishub Lampung	PT KAI
8	Pengembangan Layanan Kereta Api Antar Kota Lintas Rejosari – Bakauheni	Lintasan	1											Dishub Lampung	PT KAI
9	Pengembangan Layanan Kereta Api Antar Kota Shortcut Rejosari – Tarahan	Lintasan	1											Dishub Lampung	PT KAI
10	Pengembangan Layanan Kereta Api menuju Pelabuhan Panjang (menghubungkan wilayah sumber daya alam dan kawasan produksi dengan pelabuhan);	Lintasan	1											Dishub Lampung	PT KAI
11	Pengembangan layanan kereta api perkotaan yaitu meliputi kota: Bandar Lampung.	Lintasan	1											Dishub Lampung	PT KAI
12	Pengembangan layanan kereta api yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera (Interkoneksi)	Lintasan	1											Dishub Lampung	PT KAI

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030		
	dengan pembangunan Jembatan Selat Sunda														
13	Pengembangan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan meliputi: Panjang (Lampung).	Lintasan	1											Dishub Lampung	PT KAI
14	Studi Pengembangan perencanaan perkotaan Stasiun Panjang – Radin Inten II - Beranti	lintasan	1												

6. Transportasi Laut

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030		
1	Pengembangan Transportasi Laut Perintis	-	-											Dishub Lampung	Pelindo
2	Pelayaran Jalur Srengsem – Jakarta dan kota-kota lain yang berpotensi	Jalur Pelayaran	1											Dishub Lampung	Pelindo
3	Perencanaan Perluasan Jaringan Pelayaran Melalui Pelabuhan Panjang, Kota Agung, Mesiwi dalam rangka program Sumatera shipping line;	Jalur Pelayaran	1											Dishub Lampung	Pelindo
4	Peningkatan peran pelayanan dan status pelabuhan-pelabuhan;	-	-											Dishub Lampung	Pelindo
5	Pertuasan jaringan pelayaran melalui Pelabuhan Panjang	-	-											Dishub Lampung	Pelindo
6	Perluasan jaringan pelayaran melalui Pelabuhan Kota Agung	-	-											Dishub Lampung	Pelindo
7	Pertuasan jaringan pelayaran melalui Pelabuhan Mesiwi	-	-											Dishub Lampung	Pelindo

Lampiran IV Tabel Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Wilayah di Provinsi Lampung (2014,2019,2025 Dan 2030)

7. Transportasi Antar Moda

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Jumlah	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030		
1	Prasarana Antarmoda (Optimalisasi dan Pembangunan)													Dishub Lampung	
2	Pembangunan dan peningkatan kapasitas gudang bongkar muat barang di Pelabuhan Panjang													Dishub Lampung	
3	Peningkatan kapasitas dan kondisi jaringan jalan menuju pelabuhan Panjang													Dishub Lampung	
4	Pembangunan jaringan prasarana multimoda di Bandara Raden Inten II terkait dengan moda KA dan moda jalan													Dishub Lampung	
5	Pembangunan terminal dan halte yang berdekatan dengan Bandara Raden Inten II													Dishub Lampung	

8. Transportasi Jalan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Jumlah	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030		
1	Pemantapan II ruas jalan strategis provinsi	-	-											Dinas PU BM Lampung	
2	Pembukaan jaringan jalan pada daerah yang terisolasi	-	-											Dinas PU BM Lampung	
3	Peningkatan Jalan ruas Terbangki Besar – Simpang Menggala													Dinas PU BM Lampung	
4	Pembangunan peningkatan kapasitas Jalan pengumpan (feeder): Teginceng – Sukadana, dan Gayam - Ketapang													Dishub Lampung	
5	Perencanaan Terminal type A di Bakauheni dan Menggala	Unit	2											Dishub Lampung	
6	Terminal Type C di Way kanan	Unit	1											Dishub Lampung	
7	Peningkatan Kapasitas Jalan Ruas Punguh Raharjo - Jabung	Km	29,29											Dinas PU BM Lampung	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Jumlah	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030		
8	Peningkatan Kapasitas Jalan Ruas Simpang Penawar - Gedung Aji Baru	Km	20,30											Dinas PU BM Lampung	
9	Peningkatan Kapasitas Jalan Ruas Gedung Aji Baru - Rawa Jitu	Km	40,76											Dinas PU BM Lampung	
10	Peningkatan Kapasitas Jalan Ruas Simpang Unit VIII - Gedung Aji	Km	30,00											Dinas PU BM Lampung	
11	Peningkatan Kapasitas Jalan Ruas Gedung Aji - Umbul Mesir	Km	40,00											Dinas PU BM Lampung	
12	Peningkatan Kapasitas Jalan Ruas Simpang Mesuji B – Wiralaga	Km	38,46											Dinas PU BM Lampung	
13	Peningkatan Kapasitas Jalan Ruas Jl. Pramuka (Bandar Lampung)	Km	4,01											Dinas PU BM Lampung	

9. Transportasi Sungai dan Danau

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Jumlah	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030		
1	Pembangunan dermaga dan fasilitas penunjang di Way Sekampung;	Unit	1											Dishub Lampung	
2	Pembangunan dermaga dan fasilitas penunjang di Way Tulang Bawang;	Unit	1											Dishub Lampung	
3	Pembangunan dermaga dan fasilitas penunjang di Way Seputhi;	Unit	1											Dishub Lampung	
4	Pembangunan Dermaga Dente Teladas dan fasilitas penunjang di Kab. Tulang Bawang;	Unit	2											Dishub Lampung	
5	Pembangunan dermaga dan fasilitas pendukung di Danau Ranau;	Unit	1											Dishub Lampung	
6	Pengembangan dan pembangunan Transportasi Sungai Mesuji	Unit	1											Dishub Lampung	

10. Transportasi Penyeberangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Jumlah	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030		
1	Pembangunan Dermaga-V dan Dermaga-VI dan fasilitas penunjang Pelabuhan Bakahehi;	Unit	3											Dishub Lampung	PT ASDP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030		
	Feeder KA: Tanjung Karang – Tegayeneng – Metro; yaitu akses jalan yang menghubungkan stasiun dan daerah penghasil komoditi di Kabupaten Lampung Selatan dan Metro													Dishub Lampung	
3	Pembangunan sarana dan prasarana Feeder KA Bandar Lampung– Terbangi Besar–Menggala; yaitu akses jalan yang menghubungkan stasiun dan daerah penghasil komoditi di Kabupaten Tulang Bawang.	Lintasan	1											Dishub Lampung	PT KAI
4	Pengembangan sarana, prasarana Transportasi KA Bandar Lampung – Way Kanan;	Lintasan	1											Dishub Lampung	PT KAI
5	Pembangunan sarana dan prasarana Transportasi Batubara Tanjung Enim-Lampung PT. Bukit Asam – Transfacific Railway Infrastructure (Double Track);	Lintasan	1											Dishub Lampung	PT KAI
6	Pengembangan sarana dan prasarana jalur Bakaubeti – Sukadana – Menggala – Kayu Agung (Trans Sumatera/Asia Railways);	Lintasan	1											Dishub Lampung	PT KAI
7	Pembangunan sarana dan prasarana jaringan KA Bandar Lampung – Bakaubeti;	Lintasan	1											Dishub Lampung	PT KAI
8	Pembangunan sarana dan prasarana KA ke Bandara Radin Inten II;	Lintasan	1											Dishub Lampung	PT KAI
9	Pembangunan sarana dan prasarana KA ke Pelabuhan Panjang;	Lintasan	1											Dishub Lampung	PT KAI
10	Pembangunan sarana dan prasarana KA ke pusat industri/kawasan industri Lampung (KAIL) Tanjung Bintang;	Lintasan	1											Dishub Lampung	PT KAI
11	Pembangunan sarana dan prasarana KA berkecepatan dan berkapasitas tinggi;	-	-											Dishub Lampung	PT KAI
12	Pembangunan sarana dan prasarana shortcut Rejosari-Bandar Lampung	Lintasan	1											Dishub Lampung	PT KAI
13	Investasi Peralatan dan Modal Kerja untuk Produksi PT INKA	-	-											Dishub Lampung	PT KAI

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030		
	dalam mendukung penyediaan sarana transportasi umum murah														

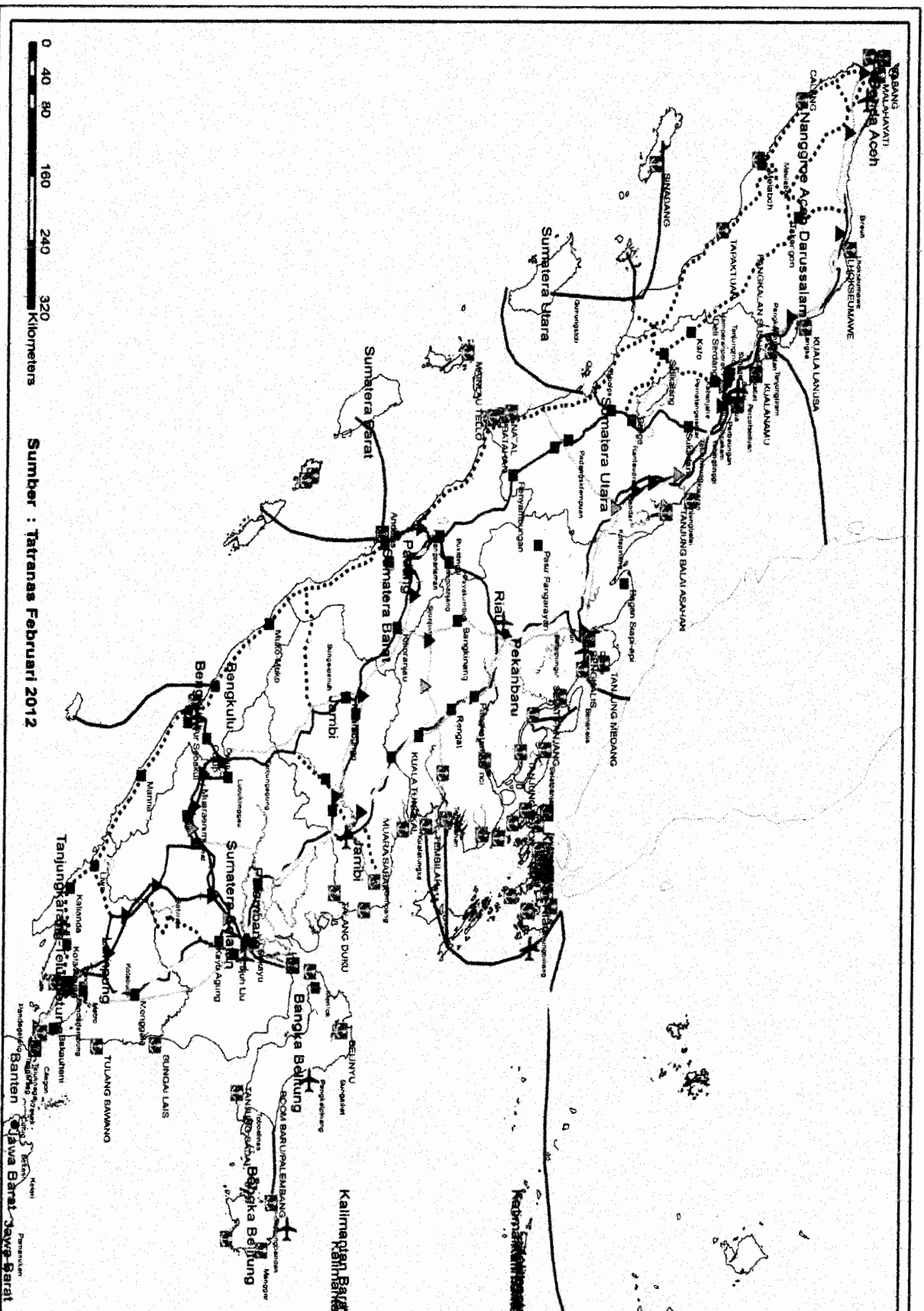
12. Transportasi Laut

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030		
1	Pengembangan Pelabuhan Regional Mesuji, Teluk Betung, Ketapang, Legundi, Sebesi, Kuala Penet, Labuhan Maringgai, Way Sekampung, Tabuan, Teladas, Menggala, Tulang Bawang, Bengkulu, Kelumbayan	Unit	15											Dishub Lampung	Pelindo
2	Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal Krui, Kalianda, Way Seputih, dan Sungai Burung	Unit	4											Dishub Lampung	Pelindo
3	Peningkatan dan pengembangan Terminal Konvensional, Terminal Peti Kemas dan Terminal Curah Cair di Pelabuhan Panjang, termasuk perluasan area tangki timbun.	Unit	4											Dishub Lampung	Pelindo
4	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasana di pelabuhan Kota Agung	Unit	1											Dishub Lampung	Pelindo
5	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasana di pelabuhan Tulang Bawang	Unit	1											Dishub Lampung	Pelindo
6	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasana pelabuhan pengumpan sesuai dengan jumlah aktivitas perekonomian yang ada seperti pelabuhan Mesuji, Labuhan Meringgai, Pulau Tabuan.	Unit	3											Dishub Lampung	Pelindo
7	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasana pelabuhan pengumpan sesuai dengan jumlah aktivitas perekonomian yang ada dan yang akan dikembangkan, seperti pelabuhan Legundi, Pulau Sebesi, Kuala Penet, Way Sekampung,	paket	8											Dishub Lampung	Pelindo

13. Transportasi Udara

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH	TAHAPAN PENGEMBANGAN										PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030		
1	Pembangunan Bandar Udara Gatot Subroto sebagai Bandar Udara Sipil	Unit	1											Dishub Lampung	Pem Kab. Way Kanan
2	Pengembangan Bandara Perintis di Way Kanan dan Mesuji													Dishub Lampung	Pem Kab. Way Kanan dan Mesuji
3	Pembebasan lahan lanjutan untuk terminal baru (125 ha)	ha	125											Dishub Lampung	PT Angkasa Pura
4	Land clearing perpanjangan landasan dan runway strip sepanjang 500 m menjadi 3.000m.	m	2.500											Dishub Lampung	PT Angkasa Pura
5	Penambahan luasan terminal baru menjadi 18.000 m2 dan dimensi lebar apron bertambah 30m menjadi 146 m.	m	96											Dishub Lampung	PT Angkasa Pura
6	DED terminal baru (sisi darat dan sisi udara)	-	-											Dishub Lampung	PT Angkasa Pura
7	Peningkatan Kapasitas prasarana terhadap demand penumpang	-	-											Dishub Lampung	PT Angkasa Pura
8	Land clearing dan Pembangunan Jalan Akses untuk PKP-PK di Bandara Pekonserai	m ²	6 x 700											Dishub Lampung	PT Angkasa Pura

LAMPIRAN V PETA PULAU SUMATERA



**KETERPADUAN JARINGAN
PRASARANA TRANSPORTASI NASIONAL
TAHUN 2030 DI PULAU SUMATERA**

Legend :

Jaringan Transportasi Sumatera

Keterangan

- Sabuk Tengah
----- Jaringan Persebaran Wabak, 2010
----- Jaringan Kereta Api tahun 2030
----- Jaringan Kereta Api tahun 2010
----- Jalan Nasional tahun 2030
----- Jalan Nasional tahun 2010
----- Sabuk Selatan
----- Sabuk Utara

Moda Transportasi Sumatera

- ✈️ **Bandara Utama Pangkajene-Primer 2030**
- ✈️ **Bandara Utama Pangkajene Sekunder 2030**
- ✈️ **Bandara Utama Pangkajene Tersier 2030**
- ✈️ **Pelabuhan Pengumpul Tahun 2030**
- ✈️ **Pelabuhan Utama Tahun 2030**
- ⚓ **Satelur Koralat ap. Tahun 2030**
- ⚓ **Satelur Koralat ap. Tahun 2030**
- ⚓ **Terminal Tipe A Tahun 2030**

Kegiatan :

**Study Tinjau Ulang Tatravil
Provinsi Lampung
dalam Mendukung Percepatan
Pembangunan Ekonomi
di Koridor I Sumatera**

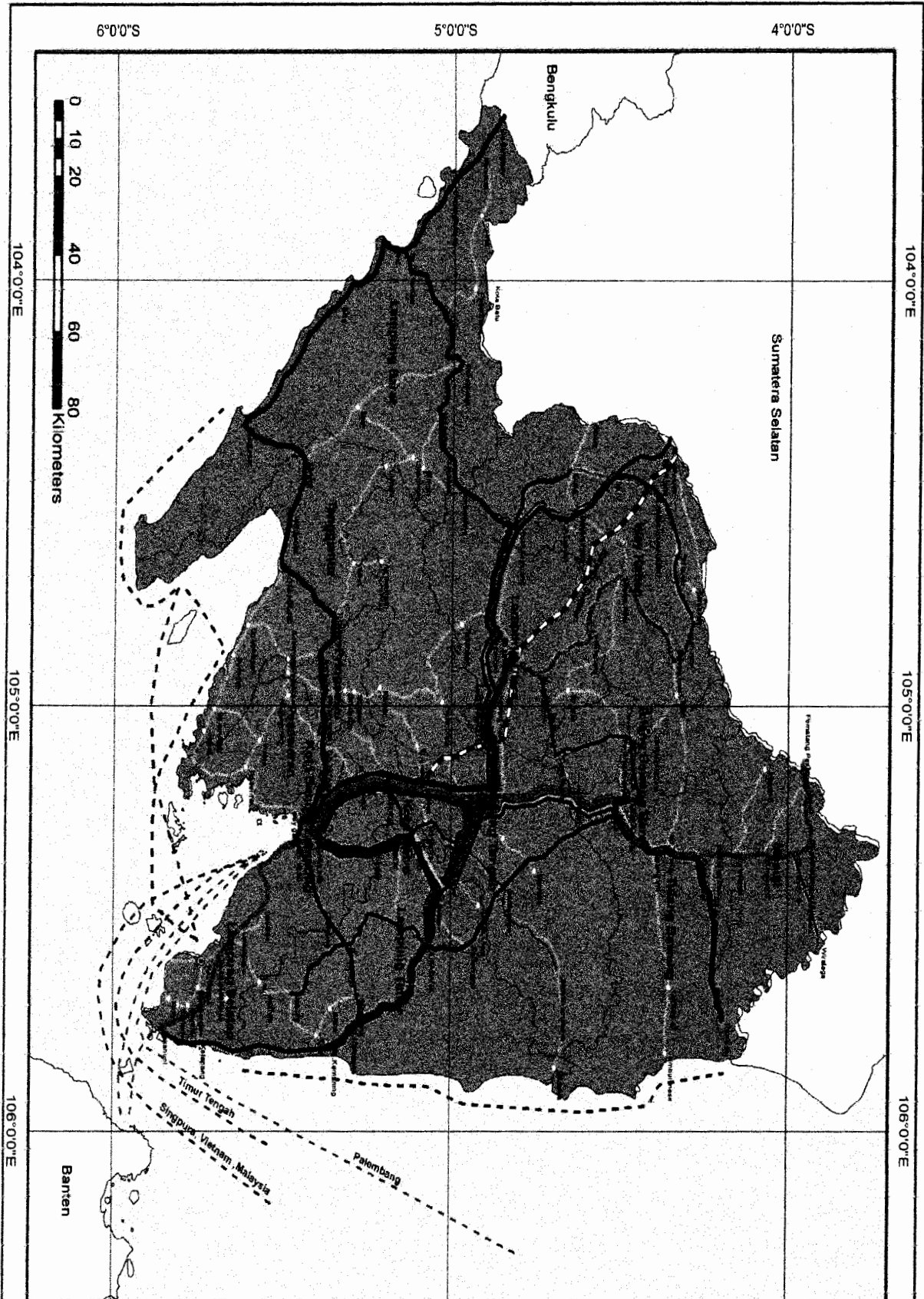
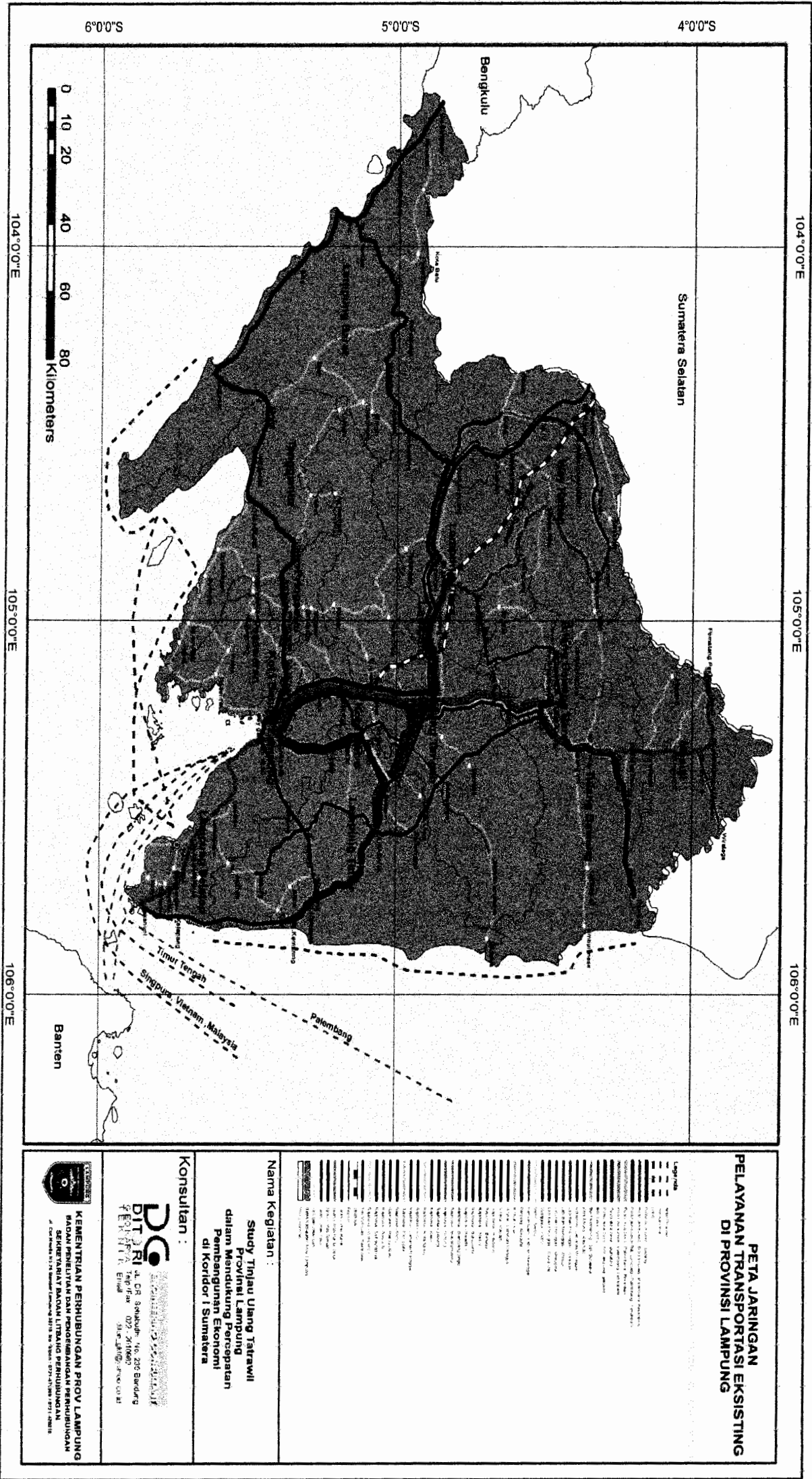
Konsultan :

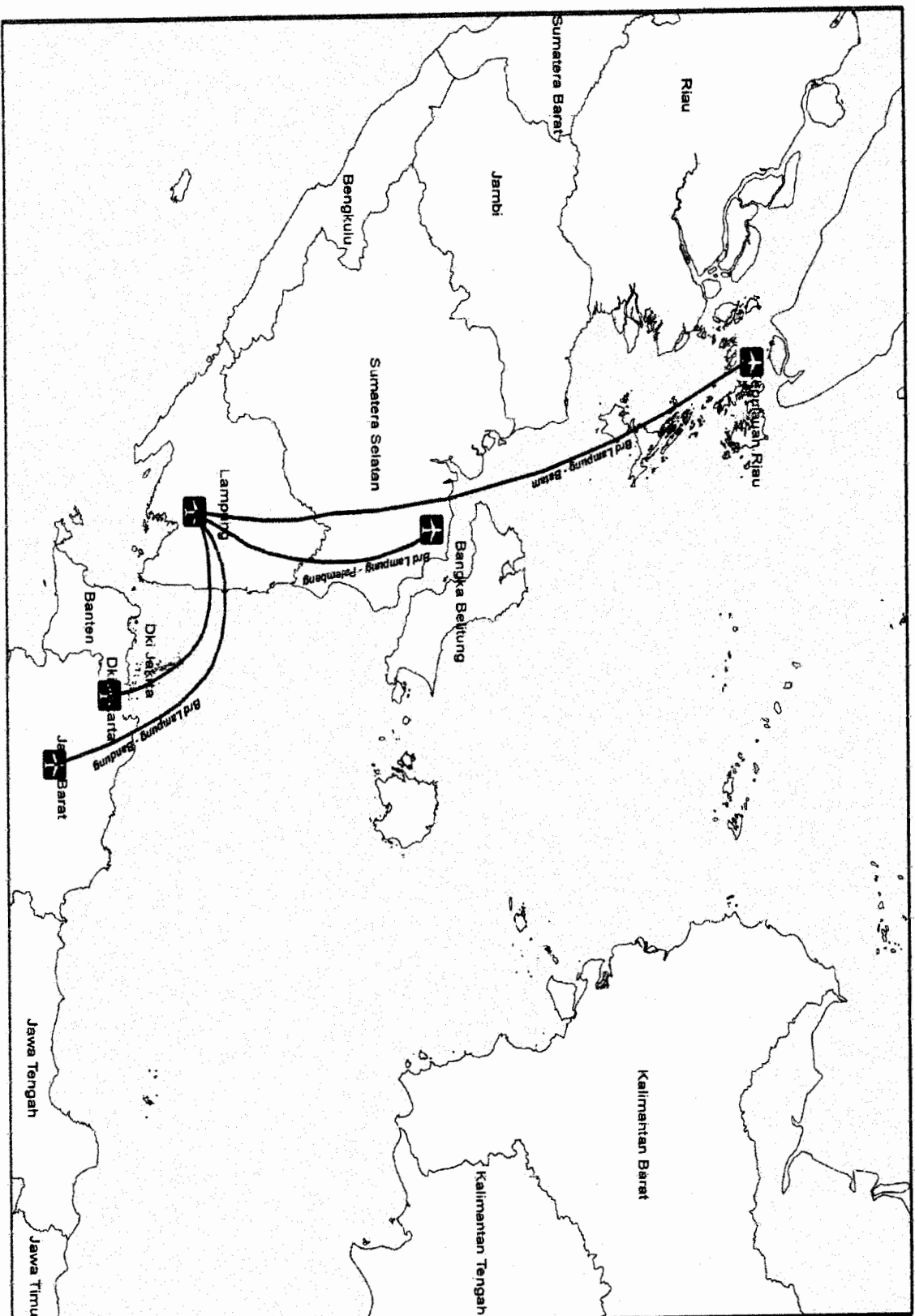


at L&L Bookstore, 400 25th Parkway
Emp. # 44 772-2710882
Email: chris@l&lbooks.com

[illegible]

**Lampiran VI Peta Jaringan Pelayanan Transportasi Di Provinsi Lampung
(Jaringan Antar Provinsi dan Dalam Provinsi) (2014,2019,2025 Dan 2030)**





PETA RUTE PELAYANAN TRANSPORTASI UDARA DI PROVINSI LAMPUNG

Legenda

-  Rule Penerbangan
-  Bandar Udara
-  Batas provinsi

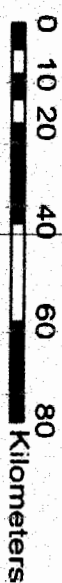
Nama Kegiatan :
Study Tinjau Ulang Tatravili
Provinsi Lampung
dalam Mendukung Percepatan
Pembangunan Ekonomi
di Koridor I Sumatera

Konsultan :

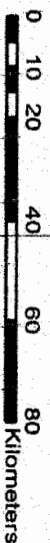
DC
DITRI
Jl. C.R. Amelsan No. 239 Bandung
Telp. (022) 2510862
Email : diti@dc-indonesia.com



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PROV LAMPUNG
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN
Jl. C.R. Amelsan No. 239 Bandung Telp. (022) 2510862



100



1. **Penelitian** : Penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi terhadap hasil belajar siswa.

2. **Metode** : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan kuasi eksperimen.

3. **Hasil** : Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa.

4. **Simpulan** : Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

5. **Saran** : Saran dari penelitian ini adalah agar peneliti lain dapat melakukan penelitian serupa untuk memperkuat temuan ini.

Konsultan :

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PROV LAMPUNG
BADAN PENELITIAN DAN PENGENDALIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN
Jl. Citarumduren No. 7 Bandar Lampung 35118, Pk. Baganan 021-410208 - 021-4411210.

**Lampiran VII Peta Jaringan Prasarana Transportasi Di
Provinsi Lampung (Jaringan Skala Nasional dan Skala
Provinsi) (2014,2019,2025 Dan 2030)**



